
KERANGKA ACUAN KEGIATAN

PELAKSANAAN MONITORING DIBIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYATAN KEPERCAYAAN DI DAERAH TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai sebuah kesejahteraan hidup di negeri ini. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Tak hanya masalah ekonomi, adat istiadat atau budaya seni, tapi juga termasuk agama. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari keberagaman. Kemajemukan yang ditandai dengan keanekaragaman sosial budaya, agama itu mempunyai kecenderungan kuat terhadap identitas masing-masing dan berpotensi konflik. Indonesia merupakan salah satu contoh masyarakat yang multikultural. Multikultural masyarakat Indonesia tidak saja karena keanekaragaman suku, budaya, bahasa, ras tapi juga dalam hal agama. Agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia adalah agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu. Dari agama-agama tersebut terjadilah perbedaan agama yang dianut masing-masing masyarakat Indonesia. Dengan perbedaan tersebut apabila tidak terpelihara dengan baik bisa menimbulkan konflik antar umat beragama yang bertentangan dengan nilai dasar agama itu sendiri yang mengajarkan kepada kita kedamaian, hidup saling menghormati, dan saling tolong menolong.

Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama menjadi ukuran untuk menjalin kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama. Kerukunan yang berpegang kepada prinsip masing-masing agama menjadi memungkinkan dan memudahkan untuk saling berhubungan. Bila anggota dari suatu golongan umat beragama telah berhubungan baik dengan anggota dari golongan agama-agama lain, akan terbuka kemungkinan untuk mengembangkan hubungan dalam berbagai bentuk kerjasama dalam bermasyarakat dan bernegara.. Di tengah kemajemukan

masyarakat dalam perbedaan keyakinan agama ternyata mampu membangun sikap untuk saling menghormati antar pemeluk agama.

Dengan demikian dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi, social budaya dan agama di Sumatera Barat, maka perlu dilakukan pemantauan atau monitoring yang berkelanjutan, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan situasi dan kondisi daerah dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan, Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkootika dan Prekursor Narkotika.
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6806);
10. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah di Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019.
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
14. DPPA-SKPD Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

A. MAKSUD, TUJUAN DAN HASIL

1. Maksud

Kegiatan Pelaksanaan monitoring dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah, ini adalah dalam rangka mengetahui perkembangan situasi dan kondisi daerah berkaitan dengan ketahanan ekonommi, sosial budaya dan agama.

2. Tujuan

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan adalah agar perkembangan situasi dan kondisi daerah diharapkan dapat berjalan dengan baik, tanpa adanya permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

3. Hasil

Adapun hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah dalam rangka mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkaitan dengan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama.

BAB II PELAKSANAAN

A. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Pelaksanaan monitoring dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah ini adalah melaksanakan monitoring perkembangan situasi dan kondisi daerah berkaitan dengan Ketahanan ekonomi, social budaya dan agama

B. METODOLOGI

Pelaksanaan monitoring dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah, adalah dengan melaksanakan monitoring dan

pemantauan situasi dan kondisi daerah berkaitan dengan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama ke Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan monitoring dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah, akan dilaksanakan pada Tahun 2023.

BAB III

PEMBIAYAAN

A. SUMBER DANA

Segala biaya yang ditimbulkan untuk mendukung kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

B. PEMANFAATAN DANA

Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah Tahun 2022 didukung dengan dana sebesar Rp. 19.220.0000,- (Sembilan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023. Yang akan dipergunakan untuk Belanja Barang dan Jasa.

BAB IV

PENUTUP

1. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) ini disusun, sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan monitoring dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah.

2. Setelah selesai kegiatan maka, akan dibuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Padang, Oktober 2022

KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL BUDAYA, AGAMA DAN ORMAS



MUZA HAR, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19681122 199009 1 002